BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hak Ciption Landasan Teori Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Washington Bishop tanggan Konsep tanggan Konse Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 970an, yang secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan prkatik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masayarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai (value)
secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha.

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Stakeholder diartikan sebaga

Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh perusahaan. Teori stakeholder juga omemberikan gambaran bahwa tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (stockholder). Kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebenarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk *stakeholder*, paitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan.

 $\textbf{2. Teori Legitimasi} \; (\textit{Legitimacy Theory})$

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Rahim, 2013: 50).

Legitimasi juga menjelaskan mengapa pengungkapan lingkungan disediakan secara sukarela, yaitu bahwa perusahaan-perusahaan mengungkapkan

পৌ Kiah Gie) থ Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



aspek-aspek ini karena alasan akuntabilitas dan visibilitas, sebagai cara untuk melegitimasi kegiatan mereka dan dengan demikian berusaha untuk Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) menggambarkan diri mereka kepada masyarakat bahwa mereka bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan konsisten dengan norma-norma sosial yang berlaku (Jones dan Ratnatunga, 2012: 232).

Lindbolm dalam Lu dan Abeysekera (2014: 43) mendefinisikan teori legitimasi (*legitimacy theory*) sebagai berikut:

"Sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan."

Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Unerman et al, 2010: 131). Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan "legitimacy gap" dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Menurut Ihlen et al. (2011: 51), ada sejumlah praktek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan legitimasi. Salah satu kegiatan yang disarankan sebagai alat untuk meningkatkan legitimasi adalah corporate philanthrophy. Sebagai contoh, organisasi yang memiliki kinerja sosial negatif dalam bidang isu lingkungan dapat menggunakan kontribusi amal untuk memperkuat legitimasinya sehingga organisasi tersebut dapat memperoleh kembali legitimasinya dari masyarakat.

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai nperusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat Hak cipta milik IBI mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Dalam mengelola dan menja seorang agen sehingga tidak dapa seorang agen sehingga tidak dapa suatu bagian dari proses berjalany prinsipal, mempunyai kewajiban Kinerja agen tersebut akan di eva perusahaan. Dengan kata lain lap dari agen terhadap prinsipal selah harapan prinsipal.

Teori keagenan memandang Dalam mengelola dan menjalankan suatu perusahaan tentu saja dibutuhkan seorang agen sehingga tidak dapat disangkal bahwa teori keagenan merupakan suatu bagian dari proses berjalanya suatu perusahaan. Agen yang di kontrak oleh prinsipal, mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan kepentingan prinsipal. Kinerja agen tersebut akan di evaluasi oleh prinsipal melalui laporan keuangan perusahaan. Dengan kata lain laporan keuangan merupakan saran akuntabilitas dari agen terhadap prinsipal sehingga agen akan dituntut untuk memenuhi

Teori keagenan memandang perusahaan sebagai nexus of contracts, yaitu organisasi yang terikat kontrak dengan beberapa pihak seperti pemagang saham, supplier, karyawan (termasuk manajer) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Scott, dikutip oleh Komalasari dan Anna 2013). Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi fokus pada hubungan dan ketidakserasian tujuan (goal incongruance) antara manajer atau agen terhadap pemegang saham dan memiliki potensi untuk timbulnya konflik kepentingan dan memicu biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan yang muncul karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan, dinamakan mekanisme corporate governance.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan intitusional dan (n)kepemilikan manajerial adalah dua mekanisme corporate governance utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan pada perusahaan. Dalam teori agensi, informasi tidak terdistribusikan secara memadai antara agen, karena principal tidak selalu berada di perusahaan sehingga mengelola perusahaan yang dapat menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi perusahaan menimbulkan suatu kesempatan bagi manajemen untuk melakukan kecurangan sehingga memaksa pihak pemilik perusahaan untuk memberikan insentif yang layak kepada manajemen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan (monitoring cost) untuk mencegah kecurangan yang dilakukan manajer.

Asset Growth atau Keputusan Investasi

Keputusan investasi merupakan suatu keputusan melepaskan dana saat sekarang dengan harapan untuk menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal (Mulyadi, 2006 dalam Pujiati dan Widanar, 2007). Ditinjau dari segi ruang lingkup usahanya, investasi dapat dibagi menjadi dua:

- Investasi pada aktiva nyata (real assets atau real investment), misalnya untuk pendirian pabrik-pabrik, hotel, perkebunan dan lain-lain.
- b. Investasi pada aktiva keuangan (financial assets atau financial investment), seperti pembelian surat-surat berharga baik saham maupun obligasi.

Keputusan investasi mencakup pengalokasian dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Gitman (2000) dan Brealy & Myers (2000) dalam Haruman (2008) menyatakan bahwa keputusan investasi sangat penting karena akan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan dan merupakan inti dari seluruh analisis keuangan.

Leverage atau Keputusan Pendanaan

Sumber intern yaitu dana yang berasal dari dalam perusahaan, dimana pemenuhan kebutuhan modal diambilkan dari dana yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri. Dalam hal ini sumber intern sering disebut sebagai sumber utama untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi serta tuntutan perkembangan usaha, dana yang berasal dari dalam perusahaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mencari tambahan dana yang berasal dari sumber eksternal yaitu dana yang berasal dari luar perusahaan dengan cara meminjam kepada kreditur atau melalui penerbitan saham.

Rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Solvabilitas berarti kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasi (Sawir, 2001:13).

umumnya peningkatan leverage terlihat dalam pengembalian dan risiko yang bertambah besar dan begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi proporsi hutang, maka risiko perusahaan akan semakin besar. Leverage dianggap menguntungkan apabila laba yang diperoleh lebih besar daripada beban tetap yang timbul akibat penggunaan hutang tersebut dan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

leverage dianggap merugikan bila laba yang diperoleh lebih kecil daripada beban tetap yang timbul akibat penggunaan hutang tersebut.

Institutional Ownership atau Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *asset management*. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Berdasarkan literature yang ada, kepemilikan intitusional, termasuk bank, perusahaan asuransi, asosiasi dana pension, perusahaan asuransi dan yang lainnya adalah institusi yang membeli dan menjual sejumlah besar saham; dan karena memiliki hak suara dalam rapat umum tahunan mereka secara langsung mempengaruhi keputusan manajerial perusahaan (Kane dan Velury, 2004 dalam Mahdavi et al,2001).

Dengan adanya kepemilikan istitusional dapat mengurangi masalah keagenan. Sheifer et al. (1997) dalam Suparlan & Andayani (2010) menyatakan bahwa kepemilikanm intitusional berperan mengawasi perilaku manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kepemilikan intitusional juga dikatakan dapat meningkakan nilai perusahaan. Dengan meningkatnya nilai perusahaan maka dapat mengurangi risiko terjadinya kesulitan keuangan. Semakin besar kepemilikan institusional akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Dengan kepemilikan intitusional diharapkan akan ada monitoring keputusan manajemen, sehingga mengurangi risiko kebangkrutan.

milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta



Torporate Social Responsibility (CSR)

The World Business Council for Sustainable Development (dalam Wibisono 2007) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ,sebagai:

"Continuing commitmentby business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workface and their families as well as of the local community and society at large."

Berdasarkan definisi tersebut, dapat di artikan bahwa komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi ,bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Definisi lain yang dilontarkan oleh World Bank. Lembaga keuangan global ini memandang Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Schermerhorn (2011: 73) memberi definisi CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagaian keuntungannnya (profit) bagi pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan professional merupakan wujud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

nyata dari pelaksanaan CSR di Indonesia dalam upaya penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama dengan *shareholders* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya.

Pengembangan CSR mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial.

8. Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)

a. Pengertian Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting atau corporate social responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). Hendriksen (dalam Nurlela 2008) mendefinisikan pengungkapan (disclosure) sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



(n) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(mandatory) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari paraturan yang berlaku.

Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setiap unit atau pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan memegang peranan penting.

b. Jenis-Jenis Pengungkapan

Kualitas informasi keuangan terdapat pada sejauh mana luas pengungkapan laporan yang diterbitkan perusahaan. Pengungkapan dibedakan menjadi dua, yaitu:

(1) Pengungkapan Mandatory (wajib)

Pengungkapan mandatory merupakan pengungkapan yang diwajibkan peraturan pemerintah. Pengungkapan mandatory merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah berlaku. Perusahaan memperoleh manfaat dari menyembunyikan, sementara yang lain mengungkapkan informasi. Luas pengungkapan tidak wajib sama antara negara yang satu dengan dengan negara yang

lain, sesuai dengan peraturan pemerintah dari masing-masing negara.

(2) Pengungkapan *Voluntary* (sukarela)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Teori pensignalan (signaling theory) melandasi pengungkapan sukarela ini. Manajemen selalu berusaha untuk mengawasi informaswi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (good news). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan pengungkapan sukarela (*voluntary discloseure*), maka dari itu tidak ada standar tertentu dalam melakukan pengungkapan tersebut. Keluasan pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan berdasarkan keputusan manajemen perusahaan itu sendiri. Hal ini mengakibatkan timbulnya variasi luas pengungkapan sosial yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Ukuran Dewa Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewah komisaris. Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mmengungkapkannya.

(2) Jenis Industri

Pada tiap-tiap industri, tentu memiliki ciri khas tersendiri dalam memenuhi tanggung jawba sosial perusahaan mereka. Terdapat 6 macam penggolongan industri, berdasarkan tempat bahan baku, besar kecil modal, klasifikasi atau penjenisannya, jumlah tenaga kerja, pemilihan lokasi dan produktivitas perorangan.

Selain 6 macam diatas, terdapat juga penggolongan industri berdasarkan Bursa Efek Indonesia yang dibagi menjadi 9 sektor, yaitu: Pertanian; Pertambangan; Industri Dasar dan Kimia; Aneka Industri; Industri Barang Konsumsi; Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan; Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi; Keuangan; serta Perdagangan, Jasa dan Investasi

(3) Ukuran Perusahaan

Bukti bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh ukuran perusahaan telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Menurut Meek, Roberts dan Gray (1995) dalam Fitriani (2001) perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk merekrut karyawan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



tanpa izin IBIKKG

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang yang ahli, serta adanya tuntunan dari pemegang saham dan analis

sehingga perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan

pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan kecil. Selain itu

merupakan perusahaan besar emiten yang banyak disoroti,

pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis

sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

(4) Profitabilitas

Profitablitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibelo untuk mengungkapan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham dalam Hackstone & Milne (1996) dalam Anggraini (2006). Sehingga semakin tinggi tingkat profitablitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial. Hackstone & Milne (1996) dalam Anggraini (2006) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitablitas dengan pengungkapan informasi sosial.

Global Reporting Initiative

a. Tentang GRI

Global Reporting Initiatives (GRI) merupakan suatu jaringan organisasi non-pemerintahan yang bertujuan untuk mendorong sustainabilitas korporasi dan pelaporan tata kelola, sosial, dan lingkungan. GRI menghasilkan rangka konseptual, prinsip-prinsip, pedoman dan indikator-indikator yang diterima umum dan secara global untuk mendorong organisasi agar lebih transparan dan juga agar bisa digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

organisasi dalam suatu media pelaporan yang terintegrasi yang disebut Sustainability Reporting. GRI didirikan oleh CERES dan UNEP pada 1997 di Boston (AS), namun pada tahun 2002 kantor pusatnya dipindahkan ke Amsterdam. Selain mengatur prinsip-prinsip pelaporan dan transparansi, GRI juga mengatur tentang HAM, tenaga kerja, anti-korupsi, lingkungan, dan lainnya.

Pengukuran variabel kinerja sosial dan kinerja lingkungan dalam penelitian ini akan menggunakan jenis pendekatan pengukuran isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian tanggung jawab sosial yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) yang diperoleh dari website www.globalreporting.org. Karena penelitian ini berfokus pada kinerja sosial dan kinerja lingkungan maka pengukuran yang dilakukan berdasarkan pada pengukuran pengungkapan aspek kinerja sosial dan aspek kinerja lingkungan sesuai dengan GRI.

Penelitian ini menggunakan G3.1 yang lebih lengkap dibanding pendahulunya yaitu G3. G3.1 memiliki 5 indikator lebih banyak dibandingkan G3. Indikator G3.1 (2011) yang terdiri dari tiga komponen utama kinerja, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dengan aspek sosial dibagi lagi menjadi ketenagakerjaan, hak asasi manusia, pertanggung jawaban produk, dan kemasyarakatan. Total indikator GRI mencapai 84 indikator, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 40 indikator kinerja sosial yang terdiri dari 15 indikator praktek tenaga kerja, 11 indikator hak asasi manusia, 10 indikator kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk

b. GRI Index

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kerangka kerja GRI G3.1 Guidelines 2011 digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan dalam laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan perusahaan digunakan dalam penelitian ini sebagai media untuk mengkomunikasikan tindakan tanggung jawab perusahaan dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial atau laporan berkelanjutan perusahaan kepada stakeholders untuk dapat menilai keberlanjutan perusahaan. GRI G3.1 Guidelines 2011 terdiri dari 84 indikator yang mencakup 54 indikator inti dan 30 indikator tambahan. GRI G3.1 Guidelines ini terbagi ke dalam enam kategori yaitu ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, pertanggung jawaban produk, dan kemasyarakatan. Indikator-indikator ini dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kerangka Kerja GRI G3.1 Guidelines 2011

Kategori	Aspek	Jumlah Indikator
Sti		
Ekon u ni	Kinerja Ekonomi, Kehadiran Pasar, Dampak	9
	Ekonomi Tidak Langsung	
Kinerja Lingkungan		
e :	Material, Energi, Air, Biodiversitas	30
Lingkungan	(Keanekaragaman Hayati),Emisi, Efluen Dan	
	Limbah, Produk Dan Jasa, Kepatuhan,	
=	Pengangkutan/Transportasi, Keseluruhan	
Kinerja Sosial		
Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan, Hubungan Tenaga	
	Kerja/Manajemen, Keselamatan & Kesehatan	15
	Kerja, Pendidikan & Pelatihan, Keanekaragaman	13
	& Kesempatan Yang Sama	
Hak Asasi Manusia	Praktek Investasi & Pengadaan, Non-	11
	Diskriminasi, Kebebasan Berserikat & Berunding	11

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

ipta	Jumlah	79
	Pemasaran, Privasi Konsumen, Kepatuhan	
Pertanggungjawaban	Label Bagi Produk Dan Jasa, Komunikasi	9
	Kesehatan & Keamanan Konsumen, Pemasangan	
Kemasyarakatan	Perilaku Anti Persaingan, Kepatuhan	10
	Kemasyarakatan, Korupsi, Kebijakan Publik,	
<u></u>	Penduduk Asli	
	Paksa & Kerja Wajib, Praktik Keselamatan,	
	Bersama Berkumpul, Tenaga Kerja Anak, Kerja	

Jumlah

Sumbor Global Reporting Initiative G3.1 Guidelines 2011

Nilai perusahaan

Nilai perusahaan dalam penelitian ini did

Karena nilai perusahaan dapat memberikan k
secara maksimum apabila harga saham perusaha
harga saham, maka makin tinggi kemakmum
mencapai nilai perusahaan umumnya p
pengelolaannya kepada para profesional. Para p
manajer ataupun komisaris. Nilai perusahaan
melalui beberapa aspek, salah satunya adalah b
karena harga pasar saham perusahaan men
keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki
dalam Pujiati dan Widanar (2007), "value is rep
the company's common stock which in turn
investment, financing and dividen decision". Ha Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. Karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki. Menurut Van Horne (1998) dalam Pujiati dan Widanar (2007), "value is represented by the market price of the company's common stock which in turn, is a function of the firm's investment, financing and dividen decision ". Harga pasar saham menunjukkan penilaian sentral dari seluruh pelaku pasar, harga pasar saham bertindak sebagai barometer kinerja manajemen perusahaan.

> Nilai perusahaan diciptakan dengan memaksimumkan tujuan perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemegang saham (maximization wealth of stockholders), kemakmuran pemegang saham meningkat apabila harga



saham yang dimiliknya meningkat. Nilai perusahaan pada perusahaan publik C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) ditentukan oleh pasar saham (Sartono, 2001 dalam Pujiati dan Widanar, 2007).

Menurut J. Keown, Scott, dan Martin (2004) dalam Pujiati dan Widanar (2007) terdapat variabel-variabel kuantitatif yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai suatu perusahaan, antara lain:

a. Nilai buku

Nilai buku merupakan jumlah aktiva dari neraca dikurangi kewajiban yang ada atau modal pemilik. Nilai buku tidak menghitung nilai pasar dari suatu perusahaan secara keseluruhan karena perhitungan nilai buku berdasarkan pada data historis dari aktiva perusahaan.

b. Nilai pasar perusahaan

Nilai pasar saham adalah suatu pendekatan untuk memperkirakan nilai bersih dari suatu bisnis. Apabila saham didaftarkan dalam bursa sekuritas dan secara luas diperdagangkan, maka pendekatan nilai dapat dibangun berdasarkan nilai pasar. Pendekatan nilai merupakan suatu pendekatan yang paling sering digunakan dalam menilai perusahaan besar, dan nilai ini dapat berubah dengan cepat.

c. Nilai apprasial

Perusahaan yang berdasarkan *appraiser independent* akan mengijinkan pengurangan terhadap goodwill apabila harga aktiva perusahaan meningkat. Goodwill dihasilkan sewaktu nilai pembelian perusahaan melebihi nilai buku aktivanya.

d. Nilai arus kas yang diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Nila dari arus
dibayar ok
kemudian d
merger. Nilai
merger. Nilai
akan datang
Hak Cipta Dilindungi Undana tang
Hak Cipta Dilindungi Undana tang
Hak Cipta Dilindungi Undana tang Nilai ini dipakai dalam penilaian merger atau akuisisi. Nilai sekarang dari arus kas yang telah ditentukan akan menjadi maksimum dan harus dibayar oleh perusahaan yang ditargetkan (target firm), pembayaran awal kemudian dapat dikurangi untuk menghitung nilai bersih sekarang dari merger. Nilai sekarang (present value) adalah arus kas bebas dimasa yang

Tabel 2.1 Ikhtisar Penelitian Haruman

Nama Peneliti	Haruman
Tahun	2005
Eingkungan Negara	Indonesia
≯ariabel	Independen: Leverage, Kepemilikan instituional,
≯ ariabel	Investasi
Kian	
an	Dependen : Nilai perusahaan
Hasil Penelitian	Leverage, kepemilikan institutional dan investasi tidak
•	mempengaruhi nilai perusahaan

Tabel 2.2 Ikhtisar Penelitian Rawi

2008
2008
Indonesia
Independen: CSR, Institutional Ownership dan
Leverage
Dependen: Nilai Perusahaan
Pengaruh yang positif dan signifikan antara
kepemilikan manajemen terhadap CSR,tidak adanya
pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusi
terhadap pengungkapan CSR
I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



На		
K C.		
Tabel 2.3 Mike Tabel 2.3 Ikhtisar Penelitian Nurlela dan Islahuddin		
3.		
Ikhtisar Penelitian Nurlela dan Islahuddin		
<u> </u>	<u> </u>	
	NY 1.1 1 T.1.1 11'	
Nama Penelitian	Nurlela dan Islahuddin	
‡ ahun Penelitian	2008	
± ingkungan Negara	Indonesia	
Y ariabel	Independen: CSR	
Bisnis		
nis	Dependen : Nilai Perusahaan	
H asil Penelitian	CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan	
<u> </u>		
nfo		
Tabel 2.4		
ika		
Ikhtisar Penelitian Wahyudi dan Pawestri		
<u>*</u>		
Informatika Kwik Kia		

Tabel 2.4 Ikhtisar Penelitian Wahyudi dan Pawestri

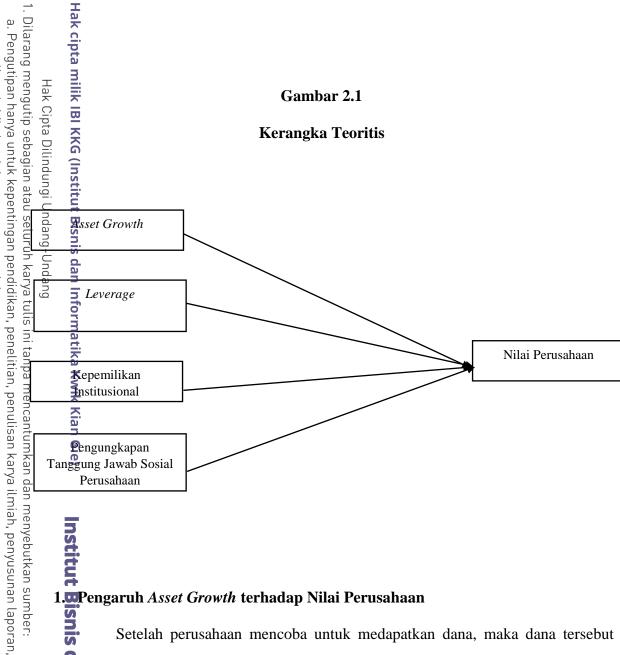
Nama Penelitian	Wahyudi dan Pawestri
ahun Penelitian	2006
Lingkungan Negara	Indonesia
Variabel	Independen: Struktur Kepemilikan, Leverage, Asset
	Growth
5	
S	Dependen: Nilai Perusahaan
Hasil Penelitian	Hasilnya menunjukkan hasil bahwa kepemilikan
7	institusional (INST) tidak berpengaruh terhadap nilai
<u></u>	perusahaan

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari tinjauan pustaka di atas, peneliti mencoba menguji kembali perfaruh Corporate Social Responsibility Disclosure, Institutional Ownership, Leverage, dan Asset Growth Terhadap Nilai Perusahaan dalam laporan keuangan pada

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah perusahaan kontruksi, property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Befikut ini disajikan gambar kerangka pikir dalam penelitian ini.



Setelah perusahaan mencoba untuk medapatkan dana, maka dana tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kentungan di masa yang akan datang. Pertumbuhan perusahaan yang positif berdampak pada nilai perusahaan akibat perusahaan yang tumbuh ini tidak berhenti berinvestasi sehingga memiliki kesempatan besar menambah laba yang diperolehnya di masa mendatang (Wilopo dan Sekar, 2002). Maka saham akan diminati oleh investor, harga saham meningkat dan nilai perusahaan semakin meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

匮



Haruman (2008) menguji pengaruh struktur kepemilikan dan keputusan Reuangan terhadap nilai perusahaan, survey pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 1994 - 2005. Hasil penelitian *leverage* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan keputusan investasi berpengaruh terhadap inilai perusahaan

Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan

Setiap perusahaan menginginkan adanya kelangsungan operasinya dan

pertumbuhan di masa yang akan datang. Salah satu keputusan penting yang harus dilakukan manajer (keuangan) dalam kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal. Apabila struktur pendanaan internal tidak mencukupi, maka perusahaan akan mengambil sumber pendanaan dari luar, salah satunya dari hutang. Apabila pendanaan didanai melalui hutang, maka akan terjadi efek tax deductible. Artinya, perusahaan yang memiliki hutang akan membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, yang dapat memberi manfaat bagi pemegang saham.

Pengurangan pajak ini akan menambah laba perusahaan dan dana tersebut dapat dipakai untuk investasi perusahaan di masa yang akan datang ataupun untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham. Apabila hal tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai mekanisme pengurang pajak, laba perusahaan meningkat, maka penilaian investor terhadap perusahaan akan meningkat.

Sehingga pendanaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Wahyudi dan Pawestri (2006) menganalisis Pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan, studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI Kahun 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tak CO: Dependentian Institusional terhadap Nilai Perusahaan

milik IB Kepemilikan mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat Adigunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain, akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif (Slovin dan Sushka, 1993 dalam Wahyudi, 2006). Dengan adanya meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif tersebut kinerja perusahaan baik, saham diminati investor, maka harga saham meningkat dan nilai perusahaan semakin meningkat.

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Haruman (2008) jumlah pemeg

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Haruman (2008) jumlah pemegang saham besar (large shareholders) mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti institusional investors akan dapat memonitor tim manajemen secara lebih efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Haruman (2008) menguji pengaruh struktur kepemilikan dan keputusan keuangan terhadap nilai perusahaan, survey pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 1994 - 2005. Hasil penelitian kepemilikan institusional (INST) berpengaruh terhadap nilai perusahaan (MVE).

4. 🔂 Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Ki an Gi

Corporate Social Responsibility adalah suatu upaya dari entitas bisnis untuk

meningkatkan *image* sebuah entitas bisnis kepada masyarakat dan mengurangi

dampak negatif terhadap operasi entitas. Good image entitas bisnis akan

Emeningkatkan nilai perusahaan melalui pengakuan positif oleh konsumen dan

masyarakat. Substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat

keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama dengan

shareholders yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian

kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas

dan *stakeholder* yang terkait dengannya.

Dengan pengungkapan kegiatan CSR tersebut akan meningkatkan minat

investor untuk menanamkan modalnya, sehingga saham diminati, harga saham

akan meningkat, nilai perusahaan juga semakin meningkat. Pengungkapan sosial

dalam laporan tahunan perusahaan yang go publik telah terbukti berpengaruh

terhadap volume perdagangan saham perusahaan. Zuhroh dan Putu (2003) bahwa

variabel pengungkapan pertanggungjawaban sosial berpengaruh pada nilai

perusahaan di Indonesia.

Hi**p**otesis

Higgerdapat pengaruh asset growth terhadap nilai perusahaan kontruksi, property, dan

real estate yang terdaftar di BEI.

Terdapat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan kontruksi, property, dan

real estate yang terdaftar di BEI.

Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan kontruksi,

property, dan real estate yang terdaftar di BEI.

32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



H4: Terdapat pengaruh pengungkapan tanggung jawab social perusahaan terhadap

nilai perusahaan kontruksi, property, dan real estate yang terdaftar di BEI.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.